

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*). *Good governance* adalah sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu masalah dalam pendapatan dan belanja daerah adalah masih lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah juga akan mempengaruhi belanja daerah. Hal yang dinilai masyarakat dimana pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerah untuk memenuhi belanja modal. Belanja modal antara lain berhubungan dengan masalah transportasi, orang, barang, dan jasa. Misalnya kualitas jalan (transportasi), perekonomian yang maju karena distribusi barang efisien jika sarana transportasi jalan memadai. Belanja modal juga berhubungan dengan bidang perhubungan melalui pembangunan jalan tol yang dapat meningkatkan perekonomian melalui akses jalan yang lebih efisien kepada masyarakat (Watusuke,2014).

Dinas Perhubungan adalah instansi pemerintah yang bergerak di

pelayanan transportasi darat, laut, dan udara. Instansi ini juga menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung transportasi. Dinas Perhubungan juga mengadakan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan pos dan telekomunikasi. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Perhubungan Kota Metro juga memiliki laporan belanja modal. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa salah satu masalah dalam pendapatan dan belanja Pada dinas perhubungan kota Metro adalah masih lemahnya kemampuan pemerintah dalam menggali potensi pendapatan daerah. Lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah juga akan mempengaruhi belanja. Hal yang dinilai masyarakat dimana pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerah untuk memenuhi belanja modal. Belanja modal Dinas perhubungan Kota Metro antara lain berhubungan dengan masalah transportasi, orang, barang, dan jasa. Misalnya kualitas jalan (transportasi), perekonomian yang maju karena distribusi barang efisien jika sarana transportasi jalan memadai. Belanja modal juga berhubungan dengan bidang perhubungan melalui pembangunan jalan tol yang dapat meningkatkan perekonomian melalui akses jalan yang lebih efisien kepada masyarakat. Prosedur pencatatan yang kurang tepat pada akan membuat pegawai kurang efektif dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, misalnya penerapan pencatatan dilakukan hanya sistem manual saja, maka hal ini akan membuat pekerjaan pegawai dinas perhubungan akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pelaporan keuangan khususnya belanja modal. Berdasarkan teknologi saat ini pencatatan dan pelaporan belanja modal dapat dilakukan dengan sistem entry data, sistem ini akan sangat membantu pekerjaan pegawai dalam pelaporan data belanja modal secara cepat, tepat dan efektif. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul: **“Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Metro”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Metro?
2. Apakah Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Metro sudah sesuai dengan satndar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Tujuan dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Metro
- b. Untuk mengetahui Apakah Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Metro sudah sesuai dengan satndar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Perhubungan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memperbaiki Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Metro
2. Bagi Universitas
Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi koleksi pustaka tentang Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal
3. Bagi Penulis
Penulis dapat belajar sekaligus menerapkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan dan dapat memenuhi keingintahuan penulis mengenai Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal